

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Mustafa, *et al.*, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ariman, Rasyid, *et al.*, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Unsri Press, Palembang.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Effendi, Tolib, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2016, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ruslan, Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji Sri, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soetarna, Hendar, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung.

Sutarto, Suryono, 2004, *Hukum Acara Pidana jilid II*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang.

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

B. Artikel Jurnal

Ridlo, Ilham Akhsanu, "Pandemi COVID-19 dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia", *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 5, No. 2, November 2020.

Adisti, Neisa Angrum, *et al.*, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2, Juni 2021.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Nasution, Aan, 2021, *Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu.

D. Internet

Media Informasi Resmi Terkini Penyakit Infeksi Emerging, "*Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 5 November 2021*", <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-COVID-19-5-november-2021>, diakses pada 5 November 2021.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "*Coronavirus dan COVID-19*", <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>, diakses pada 20 Januari 2022.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Penerapan PPKM untuk Mengendalikan laju COVID-19 dan Menjaga Kehidupan Masyarakat",

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/3159/penerapan-ppkm-untuk-mengendalikan-laju-covid-19-dan-menjaga-kehidupan-masyarakat>, diakses pada 20 Januari 2022.

Pengadilan Negeri Karanganyar, “Tata Urutan Persidangan Perkara Pidana”, <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/808-tata-urutan-persidangan-perkara-pidana>, diakses pada 23 Mei 2022.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di Bawahnya.

Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/ DJU/ SK/ PS01/ 4/ 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*.

Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1693/ DJU/ SK/ HMO2.3/ 12/ 2020 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Persidangan secara Daring (Dalam Jaringan) pada Lingkungan Peradilan Umum.

Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-049/SUJA/03/2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Ditengah Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-08. OT. 02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

MOU Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020, pada tanggal 13 April 2020;